

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan aspek fundamental pembangunan suatu negara. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab memastikan setiap warga negara menerima layanan kesehatan yang memadai. Dengan dilihat dari faktor penunjang kesehatan atau fasilitas kesehatan yang lengkap. Selain itu, pemerintah menjadikan kesehatan sebagai fokus utama untuk memenuhi hak asasi manusia. Pada kenyataannya, akses layanan kesehatan yang sulit masih menjadi permasalahan sejumlah negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan urutan ke empat. Kepadatan penduduk menjadikan Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang kompleks. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan, pemukiman penduduk yang kumuh, dan minimnya lapangan pekerjaan. Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama pemerintah yaitu *Stunting*.

*Stunting* merupakan kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan dibawah standar usia yang ditetapkan (Achjar, dkk, 2024). Apabila dilihat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Gejala *Stunting* dapat terdeteksi saat anak dalam kandungan dan terlihat

saat anak berusia dua tahun. Faktor-faktor yang menjadikan anak *Stunting* terbagi dalam 2 aspek. Pertama, penyebab *Stunting* berasal dari ibu hamil yang kekurangan gizi, mengalami infeksi kehamilan, hamil saat remaja, dan mengalami gangguan mental saat kehamilan. Kedua, penyebab *Stunting* berasal dari anak yang kekurangan gizi dan mengalami riwayat penyakit. Aspek-aspek tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan, sehingga masyarakat ekonomi menengah kebawah sering mengabaikan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak.

Permasalahan *Stunting* ini termasuk sebagai isu global yang menjadi perhatian berbagai negara. Angka prevalensi *Stunting* di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 sekitar 148,1 juta anak dengan usia dibawah 5 tahun telah terindikasi *Stunting* (UNICEF/WHO/World Bank Group, 2023: 1). Jumlah tersebut setara dengan 22,3% dari total balita global. Peningkatan angka prevalensi *Stunting* dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan negara. Ketika anak terindikasi *Stunting* maka kondisi fisik maupun otaknya dapat terganggu. Anak sulit menangkap pengetahuan dan memahami lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat membentuk pola pikir untuk merendahkan bagi kelompok masyarakat yang ekonomi menengah ke atas.

*Stunting* sebagai kondisi gangguan pertumbuhan anak yang sangat merugikan. Banyaknya kematian akibat *Stunting* menjadi fenomena yang memprihatinkan. Hampir setengah dari kematian anak berusia dibawah 5 tahun dikarenakan kekurangan gizi. Fenomena tersebut terjadi di sejumlah negara

berpenghasilan menengah hingga rendah. Akibat gangguan pertumbuhan dapat menjadikan daya tahan tubuh menjadi lemah sehingga rentan terkena berbagai penyakit hingga kematian. Resiko kematian dapat terindikasi apabila anak mengalami komplikasi kesehatan, seperti gangguan kesehatan jantung, masalah pernapasan, dan infeksi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran berbagai pihak untuk mengurangi angka kematian pada anak. Pihak-pihak tersebut dapat membantu dengan program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka prevalensi *Stunting*. Terutama pada daerah-daerah yang memiliki kondisi lingkungan tidak baik, akses kesehatan yang sulit, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki warganya.

Angka prevalensi *Stunting* di Indonesia berdasarkan Kementerian kesehatan (2023) sebesar 24,4% tahun 2021, tahun 2022 sebesar 21,6%, dan tahun 2023 sebesar 21,5%. Tingginya angka prevalensi *Stunting* di Indonesia menjadikan pemerintah berupaya dalam membentuk program dan kebijakan percepatan penurunan *Stunting*. Salah satunya yaitu target penurunan prevalensi *Stunting* menjadi 14% pada tahun 2024 di berbagai wilayah. Sehingga diperlukan penurunan *Stunting* sebesar 3,8% setiap tahun agar mencapai target penurunan 14% pada tahun 2024. Target tersebut menjadikan dampak penurunan yang positif setiap tahunnya. Namun, laju penurunan *Stunting* tidak cukup cepat untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Tren penurunan prevalensi *Stunting* didorong pemerintah pusat agar setiap daerah mampu melakukan penanganan dan pencegahan *Stunting*.

**Tabel 1. 1 Tabel Prioritas Penurunan Stunting Berdasarkan Jumlah Populasi**

NO	Provinsi	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jawa Tengah	20,9%	20,8%	20,7%
2	Jawa Timur	23,5%	19,2%	17,7%
3	Jawa Barat	24,5%	20,2%	21,7%
4	Banten	24,5%	20,0%	24,0%
5	Sumatera Utara	25,8%	21,1%	18,9%

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 provinsi dengan prioritas penurunan *Stunting* dilihat berdasarkan populasi penduduk yang tinggi. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 12 Provinsi prioritas penurunan *Stunting* yang dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan angka prevalensi *Stunting* diatas 30% dan berdasarkan populasi atau jumlah penduduk yang tinggi. Salah satu wilayah yang penduduk dengan populasi tinggi yaitu Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Tengah memiliki populasi penduduk pada tahun 2023 sebanyak 36,5 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jawa Tengah termasuk dalam 5 provinsi dengan prioritas penurunan *Stunting* berdasarkan populasi, disertai provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyuluhan, pendampingan, memberikan fasilitas pelayanan *Stunting*, serta pemantauan yang dilakukan untuk memastikan pelayanan dan bantuan di setiap daerah dapat direalisasikan. Sehingga setiap daerah mampu mencapai target

nasional sebesar 14%. Salah satu daerah yang terus mengupayakan percepatan penurunan *Stunting* yaitu Kota Semarang.

Fenomena *Stunting* menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dikarenakan jumlah prevalensi *Stunting* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang tidak stabil. Hevearita Gunaryanti Rahayu (WaliKota Semarang) meminta agar percepatan penurunan *Stunting* di Kota Semarang lebih di masifkan untuk mencapai target zero *Stunting* 2024 (Pemerintah Kota Semarang, 2024). Pemerintah melalui Dinas Kesehatan berupaya membentuk program atau inovasi untuk percepatan penurunan *Stunting*. Sasaran program atau inovasi tersebut ditunjukkan untuk ibu hamil dan anak yang terindikasi *Stunting*. Untuk ibu hamil terdapat pendampingan dan edukasi yang diberikan berupa Kelas Parenting. Untuk anak *Stunting* terdapat pelayanan *Daycare* dengan tujuan membantu orang tua dalam pola pengasuhan anak. Namun, pemerintah perlu mengajak stakeholders terkait untuk terlibat langsung dan mendorong keberjalanan program.

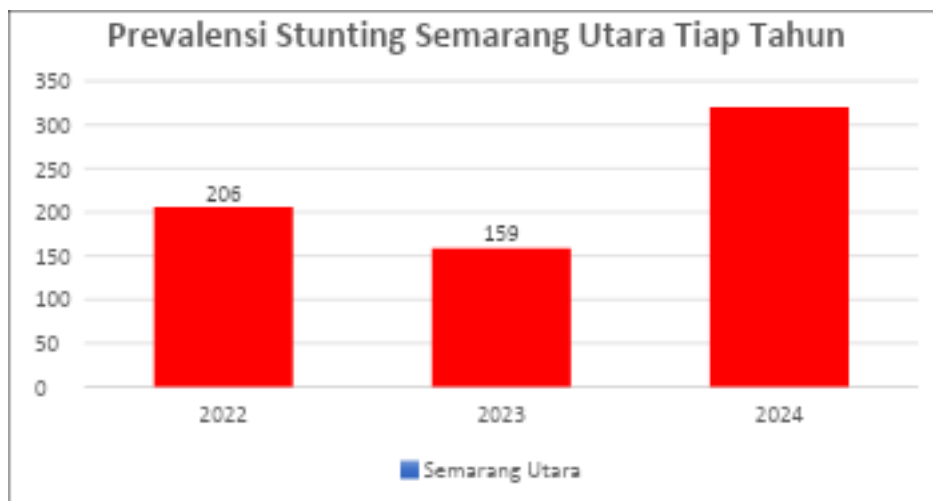
**Gambar 1. 1 Angka Prevalensi *Stunting* di Kota Semarang tahun 2022-2024**



Sumber: Portal satu data Indonesia tingkat Kota Semarang, 2024

Berdasarkan gambar 1.1 angka prevalensi *Stunting* di Kota Semarang dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen untuk mencapai target zero *Stunting* pada tahun 2024 melalui program-program yang dibuat, salah satunya program *Daycare* Rumah Pelita. Dalam program ini pemerintah berupaya untuk memenuhi gizi dan memastikan pemenuhan nutrisi pada anak. Dibalik penurunan *Stunting* di Kota Semarang terdapat ketimpangan kasus yang terjadi pada setiap kecamatan. Ketimpangan tersebut dapat dilihat pada Kecamatan Semarang Utara yang memiliki angka prevalensi *Stunting* diatas 100 kasus. Hal ini berbanding terbalik dengan kecamatan-kecamatan lain yang memiliki angka prevalensi *Stunting* dibawah 100 kasus. Selain itu, angka prevalensi *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara terus mengalami kenaikan yang signifikan. Puncaknya pada September 2024 mencapai 320 kasus anak *Stunting*.

**Gambar 1. 2 *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara tahun 2022-2024**



Sumber: Portal satu data Indonesia tingkat Kota Semarang, 2024

Kecamatan Semarang Utara merupakan daerah kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan gambar

1.2 prevalensi *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara tahun 2022 sebanyak 206 kasus, tahun 2023 sebanyak 159 dan data terbaru pada September 2024 sebanyak 320 kasus. Hal ini menjadikan Kecamatan Semarang Utara sebagai daerah darurat *Stunting*. Pentingnya peran pemerintah dan stakeholder terkait untuk berupaya menurunkan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Namun, upaya tersebut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023 angka *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara mengalami penurunan sebesar 159 kasus, namun pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan yang drastis yaitu mencapai 320 kasus. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Apabila dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Semarang Utara tergolong sebagai wilayah padat penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara tahun 2022 sebanyak 119.321 jiwa. Mobilitas penduduk yang padat dapat mempengaruhi kondisi lingkungan menjadi kumuh.

Namun, faktor utama masalah *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara adalah Ekonomi. Banyak masyarakat termasuk golongan menengah kebawah. Kemiskinan menjadikan orang tua tidak memperhatikan kondisi kesehatan dan gizi anak. Selain itu, lingkungan kumuh dapat menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah baru. Seperti akses air bersih yang susah dapat menyebabkan resiko diare dan infeksi. Termasuk sanitasi buruk yang mempengaruhi munculnya penyakit. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang lembab akibat banjir rob. Oleh sebab itu, Kecamatan Semarang Utara menjadi wilayah yang memiliki kasus *Stunting* tinggi dibandingkan kecamatan lain.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan stunting secara nasional. Perpres ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan peraturan turunan berupa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang sebagai bentuk implementasi di tingkat lokal. Perwal ini berfungsi untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program-program penanganan stunting. Salah satu bentuk implementasi percepatan penurunan stunting dari kebijakan tersebut adalah hadirnya Program Daycare Rumah Pelita.

*Daycare* Rumah Pelita merupakan program percepatan penurunan *Stunting* yang berfokus pada perbaikan pola asuh anak, perbaikan gizi, dan pendekatan melalui bentuk *Daycare* sebagai pelayanan kesehatan gratis. Program ini bertujuan menurunkan *Stunting* melalui intervensi komprehensif berupa aspek spesifik dan aspek sensitif penyebab *Stunting* pada anak. Selain membantu anak dalam pemenuhan gizi, program ini juga membantu orang tua dalam meningkatkan pengetahuan dan perbaikan pengasuhan anak melalui Kelas Parenting. *Daycare* Rumah Pelita tidak hanya terpusat pada satu lokasi saja. Terdapat 11 lokasi yang tersebar di Kota Semarang. Salah satunya Kecamatan Semarang Utara yang

memiliki kasus *Stunting* tertinggi di Kota Semarang.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibentuk, Program *Daycare* Rumah Pelita dilakukan setiap hari senin hingga jumat. Program ini, tidak hanya sekedar pengasuhan terhadap anak, namun termasuk stimulasi tumbuh kembang berupa pembelajaran sesuai kurikulum PAUD, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kelas parenting untuk orang tua, hingga pemantauan selama 3 bulan setelah anak lulus dari *Daycare* Rumah Pelita. Oleh sebab itu, melalui program ini diharapkan angka *Stunting* di Semarang Utara dapat menurun dan tentunya dapat memperkuat peran lintas sektor dalam mengentaskan *Stunting*. Walaupun pemerintah sebagai aktor kunci dan penggerak dalam penurunan *Stunting*, namun keterlibatan aktor non pemerintah sangat berpengaruh positif seperti swasta dan masyarakat. Hal ini disebut sebagai konsep *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015) adalah proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk mencapai kepentingan publik (Emerson & Nabatchi, 2015).

Namun, proses *Collaborative Governance* tidak selalu berjalan lancar. Adanya keterlibatan aktor-aktor menjadikan masing-masing pihak harus mengedepankan kepentingan bersama. Setiap aktor harus menyingkirkan kepentingan pribadi agar pengambilan keputusan bersama dapat dicapai. Oleh sebab itu, prinsip saling percaya dan saling menghormati harus diterapkan dalam proses *Collaborative Governance*. Masalah lainnya yaitu kesadaran masyarakat, dalam proses *Collaborative Governance* kesadaran masyarakat sangat diperlukan

untuk implementasi program. Terkadang masyarakat memiliki rasa enggan atau tidak mau terlibat dalam program. Mereka merasa bahwa program yang dilakukan tidak dapat mengatasi permasalahan *Stunting*. Sehingga pentingnya edukasi yang lebih masif agar *Collaborative Governance* dapat diwujudkan. Berdasarkan deskripsi diatas, tentang peningkatan kasus *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara yang memerlukan tindakan dan perhatian khusus oleh pihak-pihak terkait. Maka peneliti memiliki fokus penelitian terhadap analisis *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024?
- 1.2.2 Apa faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam menjalankan Program *Daycare* Rumah Pelita sebagai upaya Percepatan

Penurunan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara.

- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung *Collaborative Governance* dalam menjalankan Program *Daycare* Rumah Pelita sebagai upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pemerintahan tentang tata kelola kolaborasi dalam menjalankan Program *Daycare Rumah Pelita* sebagai upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti lainnya di bidang yang sama untuk dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

##### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bahan masukan bagi pemerintah mengenai strategi yang efektif dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui program. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare*

*Rumah Pelita* di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan objek atau topik dengan penelitian yang diteliti peneliti. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai rujukan untuk melakukan perbandingan dan mengkaji perbedaan penelitian. Melalui penelitian terdahulu peneliti dapat memperbanyak referensi pustaka yang dapat digunakan. Dalam penelitian, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkaitan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024. Hal-hal yang dapat dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu latar belakang, metode dan pendekatan penelitian, hasil penelitian, dan relevansinya dengan penelitian ini.

#### **1. Jurnal “*Collaborative Governance* dalam penanganan *Stunting*” oleh Ipan, Hanny Purnamasari, Evi Priyanti, Jurnal Kinerja, 18(3) (2021).**

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang membahas *Collaborative Governance* dalam penanganan *Stunting* di UPTD Puskesmas Ciampel. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana proses kolaborasi dalam penanganan *Stunting* di UPTD Puskesmas Ciampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada bahasan peran kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai langkah untuk penanganan kasus *Stunting*. Melalui penelitian diketahui bahwa Kecamatan Ciampel memiliki angka prevalensi *Stunting* yang naik dari tahun ke tahun. Dengan jumlah anak *Stunting* kategori

sangat pendek 61 kasus dan kategori pendek 196 kasus. Hal ini yang menjadikan Kecamatan Ciampel sebagai lokasi intervensi *Stunting*. Adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 terkait percepatan penanganan *Stunting* digunakan sebagai regulasi *Collaborative Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran kolaborasi yang dilakukan antara aktor pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang percepatan penanganan *Stunting*. Selain itu, terdapat keterlibatan swasta sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) melalui PT. Century Battery Indonesia yang memberikan program makan bergizi bagi ibu hamil dan balita, menyediakan fasilitas posyandu. Adapun masyarakat sebagai aktor yang terlibat dan menerima program penanganan *Stunting*. Namun, keterlibatan masyarakat tidak cukup aktif untuk menerima program-program yang diselenggarakan.

**2. Jurnal “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman” oleh Sukanti dan Nur Faidati, Jurnal Caraka Prabu, 5(1) (2021).**

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang menggunakan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan *Stunting*. Seperti dalam penelitian ini, pemerintah Kabupaten Sleman bersama swasta dan masyarakat melakukan kolaborasi dalam penanggulangan *Stunting*. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana model *Collaborative Governance*, peran masing-masing stakeholder,

dan desain kelembagaan yang digunakan dalam upaya penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman. Latar belakang penelitian menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki target penurunan *Stunting* sebesar 11,54% pada tahun 2019. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah setempat mengajak pihak-pihak lain untuk mengimplementasikan *Collaborative Governance*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data, dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Pemerintah melalui dinas-dinas membentuk program penanggulangan *Stunting* sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita *Stunting*. Program-program tersebut terdiri dari, Getar Thala, Gambang *Stunting*, PANdu TEMan, Pecah Ranting. Swasta melalui Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Sleman, Ikatan Istri Pimpinan BUMN Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang, Pengurus Ranting Nogotirto, dan berbagai universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Prodi Gizi Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berperan dalam penyuluhan, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Sementara masyarakat sebagai aktor yang berperan aktif dalam penanggulangan *Stunting* dan sebagai target program *Stunting*. Untuk desain kelembagaan menggunakan pola akuntabilitas yang diawali dengan koordinasi, implementasi program, monitoring, dan evaluasi.

### **3. Jurnal “Sinergi Lintas Sektoral Dalam upaya Percepatan Penurunan**

***Stunting* di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur” oleh Ali Imron, Cleonara Yanuar Dini, Satwika Arya Pratama, Udin Kurniawan Aziz, Siti Mudiyah Herowati, dan Fonny Indri Hartanti, National Nutrition Journal, SP(1) (2022).**

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai peran lintas sektor dalam penurunan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran lintas sektoral dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 Kabupaten Nganjuk memiliki angka prevalensi *Stunting* sebesar 25,3%. Tingginya angka prevalensi *Stunting* di Kabupaten Nganjuk masih sangat jauh untuk mencapai target *Stunting* nasional. Pemerintah telah menetapkan target prevalensi *Stunting* sebesar 14% untuk semua daerah. Oleh sebab itu, diperlukan peran lintas sektoral untuk membantu pemerintah dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif disertai dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Collaborative Governance* dapat membentuk peran kolaborasi dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Melalui peran kolaborasi, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengajak pihak-pihak diluar pemerintah untuk melaksanakan program penurunan *Stunting*. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi meliputi, perangkat desa, bidan, dan penyuluh KB sebagai aktor lintas sektoral yang mampu membantu percepatan penurunan *Stunting*. Selain itu, dalam penelitian ini aktor lintas sektoral yaitu pemerintah memiliki peran dalam menyelenggarakan program penurunan *Stunting*, pemerintah juga memberikan ruang gerak terhadap masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan secara inklusif.

**4. Jurnal “*Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Temanggung.” oleh Yuni Kurniasih, Sri Suwitri, dan Septiana Wulan Hapsari, *Jurnal of Public Administration and Local Governance*, 7(1) (2023).**

Pada penelitian ini membahas tentang permasalahan *Stunting* yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keberjalanan *Collaborative Governance* dalam percepatan pencegahan *Stunting* di Temanggung. Peneliti menjabarkan tentang pentingnya *Collaborative Governance* untuk diterapkan dalam upaya percepatan pencegahan *Stunting*. Hal ini dikarenakan Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang memiliki peningkatan kasus *Stunting*. Pada tahun 2021, angka prevalensi *Stunting* di kabupaten Temanggung mencapai 20,5%. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga menduduki peringkat 18 dari 35 Kota di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat hambatan dalam proses *Collaborative Governance*. Seperti peraturan bupati atau walikota yang tidak terlaksana, aktor yang terlibat dalam kolaborasi tidak lengkap dan adanya pergantian anggota karena mutasi. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sehingga *Collaborative Governance* dalam pencegahan *Stunting* dapat berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka prevalensi *Stunting* yang turun menjadi 17,60% dari 20,5%.

**5. Jurnal “*Collaborative Governance* dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan.” oleh Qori Hidayasa, Fitri Kurnianingsih, dan Agus Hendrayady, Jurnal JAPS, 4(2) (2023).**

Penelitian terdahulu ini membahas tentang upaya pemerintah Kabupaten Bintan bersama stakeholder terkait dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Data dinas kesehatan Kabupaten Bintan mencatat bahwa Kabupaten Bintan mengalami tren penurunan *Stunting*. Pada tahun 2021 angka prevalensi *Stunting* tercatat sebesar 5,23% atau sedikit 569 kasus kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 3.41% atau sekitar 383 kasus. Namun, penurunan tersebut tidak berdampak baik bagi desa atau kecamatan di Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan desa atau kecamatan di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan kasus *Stunting*, contohnya di desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus *Stunting* di desa Teluk Sasah karena kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua untuk mencari penghasilan menjadikan orang tua lebih memilih menitipkan anak kepada orang lain. Padahal kesehatan anak, pemenuhan gizi, dan kebersihan anak tidak dapat dikontrol penuh. Oleh sebab itu, pemerintah setempat melalui *Collaborative Governance* mengajak pihak-pihak terkait untuk menjadikan *Stunting* sebagai prioritas yang harus diselesaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses terbentuknya *Collaborative Governance* dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut, diketahui bahwa pemerintah daerah

telah melakukan kolaborasi dengan swasta atau PT Bintang Inti Industrial Estate (BIIE) melalui penyediaan bantuan logistik untuk didistribusikan kepada anak yang mengalami *Stunting*. Peran kolaborasi yang diciptakan mampu menjadikan Kabupaten Bintan mengalami tren penurunan *Stunting* yang pada awalnya 569 kasus menjadi 383 kasus.

Novelty atau yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024 Melalui Program *Daycare* Rumah Pelita yang memiliki lokus penelitian di Kecamatan Semarang Utara, serta penelitian ini mengambil kolaborasi melalui program lintas sektor yaitu *Daycare* Rumah Pelita. Untuk indikator penelitian ini menggunakan proses *Collaborative Governance* menurut Emerson & Nabatchi (2015) untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan proses kolaborasi setiap aktor dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, pada penelitian ini peneliti ingin memberikan wawasan baru kepada pembaca mengenai proses *Collaborative Governance* menurut Emerson & Nabatchi (2015) dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* atau tata kelola kolaborasi merupakan bentuk

kerjasama antara pejabat pemerintahan dengan pemangku kepentingan non pemerintahan. Fokus *Collaborative Governance* terdapat pada permasalahan publik dan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan yang terlibat (Astuti, dkk, 2020). Adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan sebagai langkah untuk mencapai keputusan bersama. Kemitraan *Collaborative Governance* antara pemerintah dan swasta dikembangkan sebelum adanya hubungan antara pemerintah dengan lembaga masyarakat. Swasta dianggap sebagai lembaga yang memiliki kelebihan dalam berinovasi, memiliki tradisi yang khas dan nilai efisiensi dibandingkan dengan lembaga pemerintahan (Astuti, dkk, 2020). Hal ini yang menjadikan lembaga pemerintah membentuk kolaborasi dengan swasta agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Menurut Ansell dan Gash *Collaborative Governance* merupakan serangkaian pengaturan yang mengatur lembaga publik dengan para pemangku kepentingan non state dapat berinteraksi secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan secara formal dengan berorientasi pada konsensus dan deliberatif, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan suatu kebijakan atau mengatur suatu program publik atau suatu aset (Ansell dan Gash, 2008).

Definisi lain menurut (Emerson & Nabatchi, 2015)

*“Collaborative Governance as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private, and civic spheres to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.”*

Berdasarkan definisi Emerson & Nabatchi, *Collaborative Governance* berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk mencapai kepentingan publik. Sedangkan menurut perspektif administrasi publik, *Collaborative Governance* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program maupun kegiatan untuk memperoleh tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan definisi administrasi publik yaitu kerjasama yang dilakukan antar individu maupun kelompok individu untuk mencapai suatu tujuan (Noor, dkk, 2022).

Definisi-definisi tersebut memiliki kriteria masing-masing. Namun yang perlu ditekankan bahwa definisi *Collaborative Governance* memiliki pokok pemikiran yang sama dan berkesinambungan. *Collaborative Governance* merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Konsep *Collaborative Governance* mulai berkembang dan digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengatasi masalah publik yaitu, sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* dalam Advokasi Kebijakan pemberian ASI Eksklusif di Kota Semarang. *Collaborative Governance* sangat berperan untuk meningkatkan pemberian ASI Eksklusif. Dalam kasus ini semua pihak bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing. Melalui *Collaborative Governance* pemberian ASI Eksklusif tingkat puskesmas yang kurang optimal dapat meningkat (Astuti, dkk, 2020).

2. *Collaborative Governance* dalam Penanganan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. Adanya program yang dibentuk dan di implementasi pemerintah untuk penanganan permukiman kumuh tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan efektivitas program dipengaruhi oleh interaksi semua pihak. Dalam penelitian ini *Collaborative Governance* sangat berpengaruh untuk membantu menyelesaikan masalah. Keberhasilan *Collaborative Governance* dalam penelitian ini, dipengaruhi oleh setiap aktor yang tidak mengedepankan kepentingan kekuasaan melainkan memberi kesempatan kepada pihak lain dalam pengambilan keputusan (Noor, dkk, 2022).

Dengan kata lain, *Collaborative Governance* dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengajak pemangku kepentingan terlibat langsung dalam penyelesaian masalah publik. *Collaborative Governance* telah banyak diterapkan diberbagai organisasi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan suatu program. Sehingga tugas dan tanggung jawab organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, keterlibatan swasta dan masyarakat perlu diakomodir oleh pemerintah sebagai aktor utama agar tercipta tata kelola kolaborasi yang baik.

Menurut Seigler, *Collaborative Governance* memiliki prinsip utama dalam penerapannya yaitu, masyarakat harus terlihat dalam produksi atau pengelolaan barang publik, masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya yang ada dan aset untuk menyelesaikan masalah publik, tenaga profesional harus berbagi keahlian yang dimiliki dengan cara pemberdayaan masyarakat, sebuah pengambilan kebijakan harus melibatkan musyawarah, pengambilan kebijakan

harus melibatkan kolaborasi yang berkelanjutan, kebijakan harus diambil secara strategis, sebuah kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian masalah publik, dan kebijakan harus mengandung prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab (Astuti, dkk, 2020).

Proses *Collaborative Governance* merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola kolaborasi yang efektif. Hal ini dapat dilihat melalui interaksi yang dilakukan setiap aktor dalam mengatasi masalah publik. Menurut Emerson dan Nabatchi proses kolaborasi terdiri dari; 1) Dinamika Kolaborasi, 2) Tindakan Kolaborasi, dan 3) Dampak dan Adaptasi. Tiga indikator ini mampu menjelaskan proses kolaborasi secara langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan.

#### 1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan mesin penggerak bagaimana proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dinamika kolaborasi memiliki peranan penting untuk menjelaskan seberapa baik sinergitas yang terjalin antar setiap pihak. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga dinamika kolaborasi bertujuan agar kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap aktor dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang sama. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015) dinamika kolaborasi terbagi menjadi tiga komponen interaksi yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Penjelasan lebih lanjutnya, sebagai berikut:

a) Penggerakan Prinsip Bersama, merupakan proses yang terjadi secara berulang

ulang dan berlanjut hingga pihak yang terlibat dapat memperoleh tujuan. Sejalan dengan pendapat Emerson dan Nabatchi yang mengatakan bahwa Penggerakan Prinsip Bersama diambil dari kata “berprinsip.” Artinya pihak-pihak yang berkolaborasi harus menyatukan prinsip mereka. Disisi lain, Penggerakan Prinsip Bersama dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan dalam pengambilan keputusan dan membantu untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. Upaya untuk menggerakkan prinsip bersama ini, dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka maupun melalui tidak langsung dengan teknologi sebagai perantara (Astuti, dkk, 2020:82). Namun, proses ini juga dinilai dari karakter setiap pihak, terkadang terdapat pihak yang memiliki karakter angkuh atau memikirkan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok. Oleh sebab itu, perlunya interaksi setiap pihak agar penyatuan prinsip dapat dijalankan. Untuk mengukur karakter setiap pihak, penyatuan prinsip bersama memiliki tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

1. *Discovery* (Pengungkapan), merupakan proses penemuan untuk menjelaskan kepentingan bersama dan nilai-nilai yang melatarbelakangi setiap pihak terlibat dalam kolaborasi. Kepentingan tersebut, harus diungkapkan agar setiap aktor saling menerima untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain dari kepentingan, proses ini dapat dianalisis melalui alasan mengapa pihak-pihak tersebut terlibat dalam kolaborasi. Pada penelitian ini, *Discovery* upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara dapat dikatakan berjalan baik. Hal ini dilihat dari keterlibatan pihak-pihak terkait secara sinergis.

2. *Deliberation* (Deliberasi), merupakan proses komunikasi yang terjalin antar pihak-pihak kolaborasi untuk mempertimbangkan masalah hingga mencari jalan keluar masalah. Pada proses ini, keterlibatan aktor sangat diperlukan agar keputusan yang diambil tepat. *Deliberation* dapat dikatakan sebagai proses yang berperan penting dalam mencari solusi atas permasalahan publik. Salah satu cara melakukan *deliberation* dengan diskusi. Melalui diskusi setiap aktor dapat menyuarakan pendapatnya masing-masing tanpa tertekan dan terbuka. Apabila terjadi konflik maka setiap aktor harus menyelesaikannya dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Pada penelitian ini, proses *deliberation* dilakukan melalui koordinasi dan forum diskusi dalam pelaksanaan program upaya percepatan penurunan *Stunting*, terutama di Kecamatan Semarang Utara.
3. *Determinations*, dijelaskan sebagai proses akhir dalam penggerakan prinsip bersama. Dengan kata lain, *determinations* adalah hasil atau keputusan yang telah disepakati dalam proses kolaborasi. Namun, *determinations* tidak secara langsung menghasilkan sebuah kesepakatan, hal ini melewati proses interaksi, komunikasi dalam diskusi bersama. Sesuatu yang dihasilkan dapat berupa solusi atas permasalahan, inovasi, dan kebijakan. Keputusan akhir yang telah didapatkan dapat menjadi dasar untuk implementasi tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam penentuan kesepakatan setiap aktor harus terlibat agar nantinya tidak terjadi konflik. Persoalan konflik akan memberatkan langkah-langkah kolaborasi kedepannya. Apabila salah satu pihak yang berkolaborasi berkonflik maka kesepakatan yang telah dibuat

tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

b) Motivasi Bersama, merupakan dorongan yang dilakukan para aktor untuk mencapai tujuan kolaborasi. Proses ini dapat dilihat apabila penggerakan prinsip bersama dapat berjalan efektif. Dengan kata lain, jika *discovery*, *deliberation*, dan *determination* tidak berjalan, maka aktor-aktor tidak dapat mencapai tujuan bersama. Akibat lainnya berupa konflik internal seperti perbedaan kepentingan, kesulitan mencari solusi, dan tujuan bersama tidak tercapai. Oleh sebab itu, motivasi bersama dapat mempengaruhi para aktor untuk membangun perannya masing-masing. Terdapat komponen-komponen yang mendukung motivasi bersama yaitu Kepercayaan Bersama, Pemahaman Bersama, Legitimasi Internal, dan Komitmen (Emerson & Nabatchi, 2015).

1. Kepercayaan Bersama, yaitu keyakinan yang terjalin antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam kolaborasi, bahwa pihak-pihak tersebut akan bekerja sama, tidak merugikan, dan memiliki komitmen terhadap suatu tujuan. Kepercayaan tidak dapat dibangun langsung dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, para aktor harus membangun interaksi secara bertahap pada proses sebelumnya. Namun, kepercayaan tidak dapat dibuktikan oleh satu pihak saja, apabila pihak satu telah memberikan kepercayaan dengan sikap jujur, transparan, dan konsisten, maka pihak lainnya harus memberikan timbal balik serupa. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen kepercayaan yang bersifat timbal balik agar pihak-pihak saling menguntungkan. Selain itu, kepercayaan bersama dijadikan sebagai landasan legitimasi, dikarenakan keputusan yang dibangun atas dasar kepercayaan dapat dengan

mudah disetujui dan bersifat adil. Jika kepercayaan yang dibangun rusak maka proses kolaborasi akan terhambat.

2. Pemahaman Bersama, berarti bahwa pihak-pihak dengan latar belakang berbeda memiliki kesepahaman yang sama tentang permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai. Pemahaman bersama tidak terjadi atas dasar saling mengetahui saja, namun didukung dengan kepercayaan yang sebelumnya dibentuk. Disisi lain, dengan membangun persepsi yang sama, para pihak yang sebelumnya memiliki latar belakang, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda dapat disatukan dalam kerangka masalah hingga tujuan yang sama. Dalam penelitian ini, kerangka masalah yang harus dihadapi para pihak adalah kenaikan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Sedangkan, tujuan yang dicapai yaitu percepatan penurunan *Stunting* melalui program *Daycare* Rumah Pelita. Tanpa pemahaman bersama, pihak-pihak yang terlibat dapat bergerak sendiri-sendiri tanpa arah dan tujuan yang sama. Lebih tepatnya, pemahaman bersama diartikan sebagai peta bersama yang dimiliki oleh setiap pihak sebagai pedoman agar fokus pada tujuan kolaborasi.
3. Legitimasi Internal, merupakan penerimaan atau pengakuan oleh pihak-pihak kolaborasi terhadap aturan maupun keputusan yang dibuat. Hal tersebut dapat berupa peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah publik maupun keputusan yang dikoordinasikan secara internal. Pada penelitian ini, terdapat Keputusan Kepala Dinas Kota Semarang Nomor 440/5143.A Tahun 2023 tentang Program *Daycare*

Rumah Pelita dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Aturan tersebut, sebagai pedoman para pihak untuk bertindak, namun tetap mengedepankan kesepakatan bersama secara adil. Sehingga pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara sah dalam kelompok. Dengan kata lain, legitimasi bersama bertujuan agar semua proses dapat berjalan dengan adil dan sah secara internal kelompok.

4. Komitmen, dijelaskan sebagai bagian terpenting proses kolaborasi. Komitmen adalah tekad atau tindakan yang dapat dipercaya untuk terlibat dari awal sampai akhir kerjasama demi tercapainya tujuan kolaborasi. Suatu komitmen tidak diukur dari perkataan yang disampaikan saja, hal ini termasuk bagaimana tindakan para pihak untuk hadir dalam setiap koordinasi, pelaksanaan program, hingga terwujudnya tujuan akhir. Hal yang terjadi apabila proses kolaborasi tidak disertai komitmen yaitu, sebagai berikut; a) pihak-pihak yang terlibat hanya sekedar formalitas atau tidak ingin terlibat langsung, b) memiliki kepentingan sendiri-sendiri sehingga tujuan kolaborasi tidak tercapai, c) program yang direncanakan terhambat karena setiap pihak tidak memegang tanggung jawabnya masing-masing. Disisi lain, komitmen harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan konsistensi yang dipegang. Agar kolaborasi dapat terus berlanjut dan tidak berhenti sebatas perkataan saja. Pada penelitian ini, indikator yang harus dicapai yaitu terlaksananya kolaborasi melalui program *Daycare* Rumah Pelita, sehingga pihak-pihak tersebut harus mempunyai komitmen yang kuat.

c) Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama, merupakan upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerjasama. Proses ini dapat mengukur seberapa jauh para pihak terlibat dalam kolaborasi. Karena tindakan kolektif tidak akan terbentuk apabila dilakukan satu pihak saja. Disisi lain, tujuan kolaborasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan, melalui kapasitas melakukan tindakan bersama, para pihak dapat secara aktif berkontribusi dalam suatu tindakan nyata tidak hanya sekedar menyetujui kesepakatan. Secara singkatnya, kapasitas melakukan tindakan bersama dapat disebut modal bersama. Yang membuat kelompok secara bersama-sama bergerak menjalankan tugasnya. Apabila proses ini lemah maka dipengaruhi oleh komponen-komponen yang tidak berjalan. Komponen tersebut, sebagai berikut:

1. Prosedur dan Kelembagaan, adalah tata cara yang disepakati untuk mengatur bagaimana tindakan kolaborasi dilakukan. Melalui prosedur yang jelas para pihak tidak akan merasa kebingungan dalam melakukan kerjasama. Sedangkan, kelembagaan membantu untuk memahami struktur tim yang terlibat beserta perannya. Apabila dilihat dalam penyelesaian masalah publik (*Stunting*), aturan prosedur seperti mekanisme pelaksanaan program *Daycare* Rumah Pelita sebagai inovasi yang dibentuk oleh lintas sektor di bawah peraturan pemerintah. Jika aturan kelembagaan seperti kejelasan peran semua pihak tanpa adanya tumpang tindih sehingga tujuan bersama dapat dicapai.
2. Kepemimpinan, merupakan inisiator yang memiliki peran penting untuk menciptakan dan mendorong kolaborasi. Pemimpin juga berperan untuk

memfasilitasi partisipasi. Seperti memberikan ruang bicara, melibatkan semua pihak dalam diskusi, serta menjaga komunikasi yang baik. Dengan kepemimpinan yang adil, proses kolaborasi akan mencerminkan kepentingan bersama. Pada dasarnya kepemimpinan, tidak hanya ditujukan untuk kemampuan seseorang saja, namun termasuk sekelompok orang untuk mengatur, mengarahkan, dan dapat memegang komitmen. Dalam penelitian ini, kepemimpinan dipegang oleh pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan sebagai pemimpin yang menginisiasi pertemuan melalui pembahasan program percepatan penurunan *Stunting*.

3. Pengetahuan, menurut Groff dan Jones pengetahuan merupakan informasi berdasarkan gabungan antara pemahaman dan kemampuan (Groff dan Jones 2003: 30 dalam Emerson & Nabatchi, 2015). Pengetahuan sebagai informasi yang dimiliki setiap pihak untuk didiskusikan kembali dalam forum. Hal ini bertujuan agar setiap pihak menerima pemahaman yang sama tentang suatu permasalahan. Oleh sebab itu, pengetahuan harus didistribusikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan informasi. Upaya distribusi informasi juga dilakukan dengan berbagai cara, seperti forum diskusi dan workshop.
4. Sumber Daya, adalah segala bentuk dukungan yang menunjang kolaborasi seperti pendanaan, tenaga ahli, peralatan maupun fasilitas lainnya. Sumber daya dapat dikatakan penting karena apabila program yang direncanakan bermanfaat, namun sumber daya yang ada tidak memadai maka program tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik. Seperti halnya masalah

*Stunting*, ketika anggaran namun tenaga ahli yang menangani program sedikit maka dapat menghambat keberjalanan program. Sebaliknya, ketika sumber daya memadai maka program akan berdampak lebih luas dan berkelanjutan.

## 2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi merupakan bagian inti dalam *Collaborative Governance*. Jika dinamika kolaborasi menekankan pada hubungan antar pihak yang harus dijaga, sedangkan tindakan kolaborasi lebih menekankan pada implementasi dan hasil nyata yang didapatkan atas tindakan tersebut. Oleh sebab itu, tindakan kolaborasi tidak dapat dilakukan secara individu dikarenakan para aktor saling membutuhkan peran satu sama lain untuk tujuan bersama. Setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kontribusi untuk ikut serta dalam setiap kegiatan maupun sebelum kegiatan berlangsung. Sebagai modal kolaborasi, pihak-pihak tersebut memiliki kemampuan berupa finansial, pengetahuan, keahlian dan sumber daya lainnya. Yang berguna dalam melakukan tindakan kolaborasi secara sinergis daripada tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sepihak atau individu.

Selain itu, tindakan kolaborasi bersifat adaptif dimana setiap pihak harus menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan maupun hambatan yang berkembang di lapangan. Tantangan-tantangan yang dihadapi dapat berupa ketidakpahaman hingga penolakan. Contohnya, terdapat beberapa orang tua yang menolak program *Daycare* Rumah Pelita karena kurangnya pemahaman atau literasi tentang inovasi tersebut. Hal ini mengharuskan aktor-aktor yang

berkolaborasi untuk membuat sosialisasi maupun langkah lainnya yang bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua. Sehingga dalam tindakan kolaborasi, fokus aktor tidak hanya pada satu masalah, namun termasuk masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Walaupun upaya adaptasi telah dilakukan pada proses dinamika kolaborasi, namun hal tersebut lebih menekankan pada penyesuaian internal kelompok. Sedangkan tindakan kolaborasi sebagai implementasi pelaksanaan program dan berhadapan dengan pihak eksternal kolaborasi.

Pada akhirnya, tindakan kolaborasi sebagai wujud nyata dari *Collaborative Governance* yang bertujuan untuk kepentingan publik. Hasil yang diperoleh tidak selalu berupa kebijakan, namun dapat berupa lahirnya inovasi dan program jangka panjang. Lebih dari itu, tindakan kolaborasi juga sebagai sarana yang menunjang kepercayaan setiap aktor dan solusi masalah publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Seperti halnya, *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan *Stunting* melalui program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara, pemerintah sebagai aktor utama tidak dapat bergerak sendiri sehingga membutuhkan peran pihak lain. Dengan demikian, tindakan kolaborasi dapat dicerminkan sebagai langkah konkret hadirnya program. Namun, keberhasilan *Collaborative Governance* juga dilihat dari bagaimana tindakan kolaborasi dijalankan, apakah berjalan sinergis atau terdapat hambatan yang menghalangi setiap pihak.

### 3. Dampak dan Adaptasi

Dampak merupakan hasil sementara yang terjadi dari proses kolaborasi.

Hasil sementara tersebut dapat berupa dampak positif atau yang dikategorikan sebagai dampak yang diharapkan dan dampak negatif atau dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan dapat terjadi apabila proses kolaborasi menghasilkan perubahan yang signifikan dan berpengaruh baik. Dalam penelitian ini, dampak yang diharapkan dapat dilihat melalui penurunan *Stunting* dan perbaikan gizi anak. Sementara, dampak yang tidak diharapkan, dapat terjadi akibat kendala-kendala yang muncul selama proses kolaborasi. Seringkali kendala yang muncul berasal dari salah satu pihak yang tidak mampu menjalin sinergitas.

Selanjutnya, kedua dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau tanggapan dari aktor. Yang nantinya diadaptasi melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring atau pemantauan bertujuan untuk melihat sejauh mana program dilaksanakan, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Adapun evaluasi merupakan kegiatan menilai suatu program untuk mengukur hasil yang dicapai. Jika monitoring memiliki fokus terhadap pemantauan proses, sementara evaluasi berfokus pada penilaian hasil akhir program. Setelah monitoring dan evaluasi dilakukan kemudian hasilnya diadaptasi kembali melalui diskusi bersama. Berbagai saran yang diterima dari hasil diskusi kemudian disaring kembali, sebagai bahan masukan untuk direkomendasikan pada tindakan kolaborasi kedepannya.

Pemilihan teori *collaborative governance* dari Kirk Emerson dan Tina Nabatchi dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan proses kolaborasi hingga dampak yang dihasilkan, serta adanya proses adaptasi yang terjadi seiring berjalannya program. Lebih lanjut teori ini tidak hanya menyoroti tahapan awal terbentuknya kolaborasi, tetapi juga menekankan pada

proses yang terjadi setelah pelaksanaan kolaborasi.

### 1.7 Operasional Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Collaborative Governance*. Dengan fokus utama terletak pada proses Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Konsep *Collaborative Governance* mengacu pada dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi (Emerson & Nabatchi, 2015).

**Tabel 1. 2 Operasional Konsep**

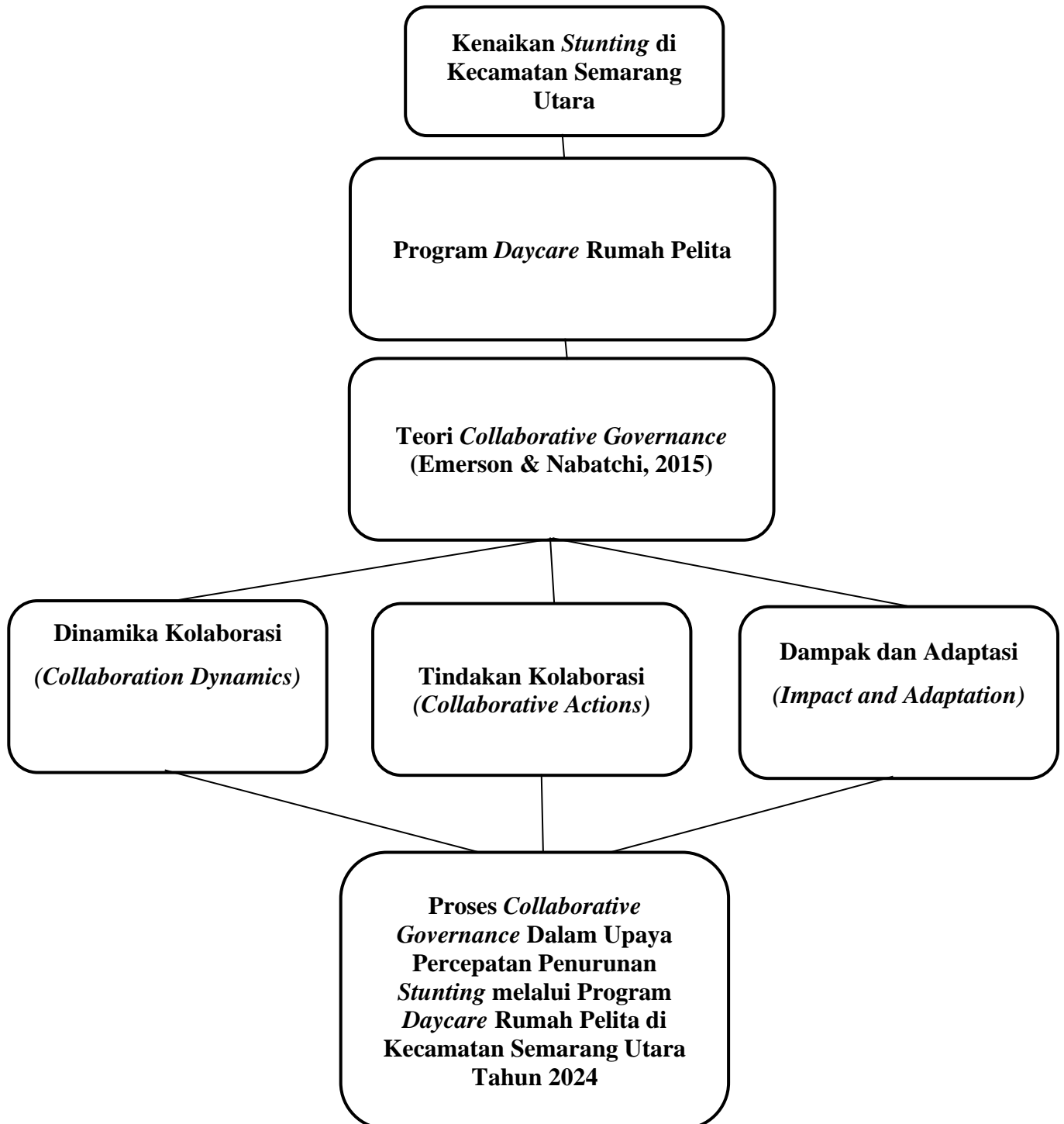
Konsep	Indikator	Parameter
<p><i>Collaborative Governance</i> adalah proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk mencapai kepentingan publik.</p>	1. Dinamika Kolaborasi	<p>1. Penyatuan prinsip aktor terlibat.</p> <p>2. Adanya motivasi bersama yang didukung kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.</p> <p>3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.</p>
	2. Tindakan Kolaborasi	<p>1. Tersusunnya SOP.</p> <p>2. Pelaksanaan program <i>Daycare</i> Rumah Pelita.</p> <p>3. Terlaksananya kelas parenting sebagai bagian dari program <i>Daycare</i> Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara.</p>
	3. Dampak dan Adaptasi	<p>1. Terjadi penurunan angka <i>Stunting</i> di Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>2. Keberhasilan program dilihat dari jumlah anak yang lulus intervensi.</p>

		3. Adanya monitoring dan evaluasi program.
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## 1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan peneliti, 2025

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, menurut (yakin, 2023) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami atau mengerti fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan serta motivasi yang dilakukan secara holistik dan dapat dengan cara deskriptif yaitu menggunakan kata-kata dan bahasa secara alamiah disertai dengan metode alamiah yang digunakan. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian kualitatif memiliki landasan pada filsafat postpositivisme. Yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah atau fenomena alamiah yang terjadi dengan teknik pengumpulan data triangulasi dan analisis data memiliki sifat induktif atau kualitatif (Sugiyono, 2013).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif mengenai *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali informasi yang mendalam dengan sudut pandang berbeda. Lebih lanjut, metode dan pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang proses *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program *Daycare* Rumah Pelita Di Kecamatan Semarang Utara. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan deskriptif dengan menganalisis proses terjadinya *Collaborative Governance* yang terbentuk dari tindakan maupun perilaku

Pemerintah dan non Pemerintah. Setiap aktor memiliki peranan masing-masing, namun memiliki tujuan bersama yang akan dicapai yaitu Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan wilayah atau tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan *Daycare* Rumah Pelita Kecamatan Semarang Utara. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* dapat berjalan. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan aspek kemudahan untuk memperoleh data secara langsung. Data tersebut digunakan untuk mendukung kebenaran penelitian yang dilakukan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024, sehingga subjek penelitian yang diambil berkaitan dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat yang terlibat. Menurut Sugiyono, hal ini disebut dengan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sehingga tidak dilakukan secara acak (Sugiyono, 2013). Subjek penelitian yang terlibat dalam proses *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Program *Daycare* Rumah Pelita Di Kecamatan Semarang Utara, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian**

No.	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ibu Permata Laila Kurniastuti, S.G	Staff Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang
2.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Bapak Yusuf Hidayat, S.Gz	Staff Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang
3.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ibu Ayu Yovita, S.Gz	Ahli Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang
4.	Puskesmas Bandarharjo	Ibu Ratih Damayanti	Pemegang Program Gizi Puskesmas Bandarharjo
5.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ibu Nisa Nurhasanah	Nutrisionis Program <i>Daycare</i> Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara
6.	Himpunan Psikologi (HIMPSI) Jawa Tengah	Bapak Fadlih Asyifara Putra S.Psi, M.Psi	Pengurus Himpunan Psikologi (HIMPSI) Jawa Tengah
7.	Masyarakat	Ibu Apriliana Wulandari	Masyarakat yang berkontribusi dalam Program <i>Daycare</i> Rumah Pelita.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

#### 1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif mencakup informasi yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata tertulis, tindakan narasi untuk mendeskripsikan proses *Collaborative Governance* dalam menjalankan Program *Daycare* Rumah

Pelita. Data kualitatif yang diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program *Daycare* Rumah Pelita untuk percepatan penurunan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui program *Daycare* Rumah Pelita.

### **1.9.5 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk mewujudkan keakuratan data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh sumber asli. Untuk mendapatkan data primer seorang peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati kondisi lapangan dan mencari informasi penelitian lebih lanjut. Sementara wawancara dapat dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adanya data primer dapat membantu menjawab permasalahan penelitian, mengetahui kondisi lapangan secara langsung, dan memperoleh data akurat dari sumber yang valid.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari penelitian atau publikasi pihak lain. Berbeda dengan data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian terdahulu, dokumen

karya ilmiah, buku. Data sekunder dapat dianalisis dan dikaji lebih lanjut untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang sesuai dengan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh data penelitian. Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan setting alamiah atau kondisi penelitian yang alamiah. Untuk teknik pengumpulan data dalam segi sumber, penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang dilakukan untuk mencari data penelitian secara langsung dengan tujuan mengetahui dan memahami kondisi lapangan serta memperoleh informasi secara nyata. Sementara sumber sekunder merupakan sumber data yang dilakukan secara tidak langsung karena dapat melalui sumber bacaan maupun publikasi milik pihak lain. Adapun jika dilihat dari segi cara, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumen.

## 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau ikut serta merasakan objek penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi program kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Lebih dari itu, observasi juga digunakan untuk menilai dampak program *Daycare* secara langsung terhadap masyarakat dan memungkinkan penemuan informasi baru yang sebelumnya tidak terungkap pada wawancara atau dokumen.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara face to face atau berhadap-hadapan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan. Proses tanya jawab dalam wawancara berdasarkan pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara terstruktur. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses kolaborasi yang terjadi. Sehingga pertanyaan dibuat relevan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan ketiga pihak untuk melihat sudut pandang mereka dalam proses kolaborasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui dokumen dan gambar. Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen bersifat publik seperti artikel, jurnal, berita, dan

buku dan dokumen privat yang didapatkan secara langsung melalui sumber penelitian saat terjun di lapangan. Contohnya notulensi rapat, foto kegiatan, laporan, dan data statistik yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga mendapatkan pemahaman penelitian lebih mendalam. Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau disebut dengan triangulasi (Sugiyono, 2013). Sugiyono juga mengemukakan bahwa teknik analisis data merupakan cara untuk menyusun data melalui hasil wawancara, catatan kondisi lapangan, dan dokumentasi baik bersifat publik atau privat (Sugiyono, 2013). Data-data tersebut kemudian dapat dikembangkan dan dianalisis lebih mendalam sehingga menghasilkan hipotesis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan atau langsung dengan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:245). Teknik analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui 3 tahapan-tahapan analisis, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara untuk merangkum, menyeleksi, dan menyederhanakan data. Hal dikarenakan banyaknya data dapat menyebabkan kompleksitas dan kerumitan penelitian. Sehingga reduksi data bertujuan agar penelitian lebih efektif dan efisien. Reduksi data tidak dilakukan secara random, tetapi dilakukan dengan memilih pokok-pokok penelitian yang dikaji, fokus terhadap hal-hal penting dan membuang data yang tidak relevan dengan penelitian. Reduksi data harus dilakukan secara tepat dan selektif agar menghindari kesalahan pengambilan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan mentranskrip data hasil observasi dan wawancara ke dalam bentuk tulisan, selanjutnya hasil transkrip diidentifikasi dan dianalisis sesuai penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang dilakukan setelah reduksi data dilakukan. Dalam penyajian data tentunya peneliti menampilkan data yang telah disederhanakan secara jelas. Data yang disajikan berupa teks secara singkat agar dapat dipahami dan bersifat naratif. Penyajian data dapat memberi kemudahan bagi peneliti untuk melakukan analisis dan menentukan kategori-kategori penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan informasi hasil penelitian dalam bentuk uraian singkat, tabel, maupun bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data secara langsung yaitu kesimpulan. Kesimpulan menjadi komponen penting untuk menjelaskan

secara keseluruhan penelitian yang dilakukan secara singkat. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan bukti-bukti yang kuat agar kesimpulan yang didapatkan bersifat kredibel. Data-data yang tidak kuat dan memiliki kemungkinan adanya pembaharuan dapat menghasilkan kesimpulan yang sementara. Sehingga pentingnya data-data yang valid dan konsisten untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil temuan lapangan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024 serta faktor pendukung dan penghambatnya.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Untuk memastikan kualitas data yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan penelitian maka peneliti melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data bertujuan agar peneliti dapat mempertanggungjawabkan data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dan *member checking* sebagai pilihan untuk menguji keabsahan data penelitian. Triangulasi merupakan pengecekan data melalui sumber-sumber berbeda disertai berbagai cara dan waktu. Dengan kata lain, triangulasi sebagai metode untuk membandingkan data melalui berbagai sudut pandang agar peneliti mendapatkan data yang terpercaya. Karena data yang diperoleh dari satu sudut pandang dapat memungkinkan keberpihakan hasil dan data yang diperoleh tidak menyeluruh.

### **1.9.8.1 Triangulasi Data**

Triangulasi dibagi menjadi lima jenis seperti Triangulasi Data, Triangulasi Metode, Triangulasi Teori, Triangulasi Analisis, dan Triangulasi Penyidik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Data yang merupakan cara pengumpulan data menggunakan teknik berbeda-beda untuk mendapatkan data penelitian dari sumber yang sama dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, penelitian ini diuji melalui sumber yang berbeda untuk mengetahui kredibilitas data. Sumber data yang diperoleh dapat berasal dari berbagai hal seperti penemuan hasil observasi, jawaban atas wawancara, maupun dokumen-dokumen yang relevan. Sebagai contoh, peneliti menerapkan tiga sumber data kepada masing-masing aktor kolaborasi. Apabila data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumen berbeda, maka dilakukan *member checking* untuk memastikan kebenaran data kepada informan yang terlibat. Namun, hasil data yang berbeda juga dapat dikatakan benar, karena berasal dari sudut pandang berbeda sehingga dapat mengurangi bias penelitian.